



# Perluasan Hak Masyarakat, Inovasi Mata Pencaharian dan REDD+ di Indonesia (PERMATA)

PERMATA merupakan inisiatif yang bertujuan mendukung pengakuan hak-hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (MAKL) yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan untuk mendapatkan penghidupan berkelanjutan serta memperbaiki tata kelola sektor hutan dan lahan yang lestari dalam mengatasi masalah deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia.

## Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (MAKL)

Indonesia yang memiliki hutan hujan terluas ketiga di dunia dan menetapkan 64 persen wilayah daratannya sebagai kawasan hutan. Namun demikian, deforestasi, degradasi hutan, dan kebakaran lahan masih menjadi persoalan dan merupakan penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar. Indonesia masuk dalam daftar 10 besar negara penghasil emisi gas rumah kaca di dunia, akan tetapi memiliki kemampuan besar dalam penyerapan karbon dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat adat dan komunitas lokalnya.

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan 37,3 juta jiwa penduduk yang tinggal di 24.863 desa berada di dalam atau berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Mereka adalah Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (MAKL) yang selama ini mengelola hutan dan lahan yang melalui kearifan lokalnya merupakan kekuatan utama bagi pengelolaan hutan yang lestari. Inisiatif PERMATA bersama-sama Pemerintah Daerah, Kementerian dan Lembaga, memfokuskan diri mendukung MAKL mendapatkan penghidupan yang adil dan lestari melalui pengembangan kapasitas terintegrasi.



## Hasil yang Diharapkan

1. Masyarakat di kabupaten sasaran mendapatkan akses ke hutan dan sumber daya alam yang lebih baik dan terjamin.
2. Penghidupan masyarakat meningkat.
3. Dimungkinkannya kebijakan dan lembaga secara aktif mempromosikan dan mendukung pengembangan masyarakat berbasis hak.
4. Masyarakat adat dan komunitas lokal memiliki kapasitas untuk mempertahankan, melindungi dan mengelola sumber daya hutan mereka sebagai bagian dari penghidupan yang tangguh dan mandiri.

## Strategi Dukungan

1. Pengakuan Hak Tenurial.
  - Mendukung kepastian hak tenurial Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (MAKL) melalui pendampingan yang partisipatif dalam pemetaan, dokumentasi, penyelesaian konflik, pendaftaran dan verifikasi kepastian berbasis bukti, dan pengajuan kepastian ke pemerintah daerah untuk mendapatkan pengakuan hak tenurial dari negara.
  - Konsolidasi dokumen hak tenurial yang dimiliki masyarakat sebagai basis data advokasi kebijakan.

Strategi ini diharapkan berkontribusi dalam mengurangi persoalan pertanahan yang dihadapi MAKL dan negara.

2. Peningkatan Penghidupan yang Adil dan Lestari.

PERMATA mendukung MAKL dalam membangun kelembagaan dan mekanisme peningkatan penghidupan serta mempromosikan pembangunan yang lestari melalui pendekatan partisipatif. Melalui cara yang bervariasi, PERMATA bersama MAKL akan melakukan pemetaan dan penilaian potensi sumber daya serta penentuan prioritas.

Strategi ini diharapkan dapat membantu MAKL dalam menentukan mekanisme yang tepat untuk meningkatkan penghidupan yang adil dan lestari seperti pengelolaan jasa ekosistem, peningkatan produksi dan konsumsi produk lokal, dan peningkatan usaha masyarakat.

3. Peningkatan Kapasitas Pemerintah di Tingkat Kabupaten.

PERMATA dengan dukungan pemerintah provinsi memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah di tingkat kabupaten dalam mempersiapkan dasar hukum dan kelembagaan untuk mengakui hak-hak masyarakat.

Strategi ini diharapkan mampu mendorong peningkatan perhatian pemerintah terhadap MAKL melalui kebijakan dan program nasional untuk terciptanya peluang yang lebih baik dalam memajukan hak dan penghidupan MAKL.

#### 4. Pemberdayaan Kelompok Perempuan dan Pemuda.

PERMATA mendukung MAKL untuk memiliki kapasitas yang terus berkembang dalam mengelola hak tenurial dan pengembangan penghidupan yang lestari melalui:

- Peningkatan kapasitas kelembagaan, pemberdayaan kelompok perempuan dan pemuda.
- Peningkatan kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil dalam pendampingan MAKL melalui kegiatan pembelajaran dan program pertukaran.

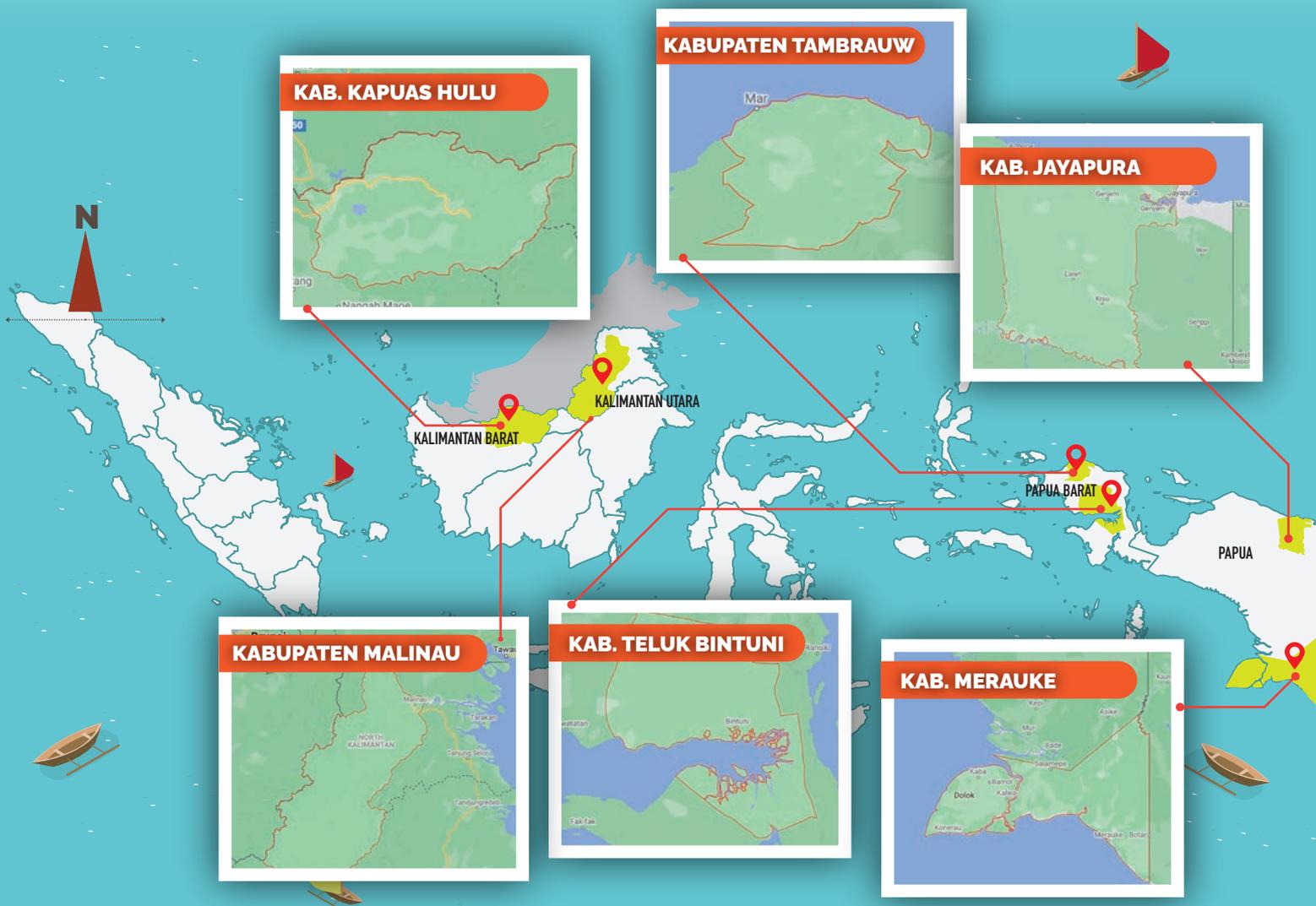
Strategi ini diharapkan mampu menjadi mekanisme yang lestari dalam mendukung MAKL.

### Kelompok Sasaran

- Penerima manfaat langsung adalah Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (MAKL) yang tinggal di kawasan hutan dan sekitar kawasan hutan di Indonesia.
- Penerima manfaat tidak langsung yaitu Pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil di tingkat lokal.

### Wilayah Kerja

PERMATA bekerja di 6 kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Papua (Kabupaten Jayapura dan Merauke), Provinsi Papua Barat (Kabupaten Tambrauw dan Teluk Bintuni), Provinsi Kalimantan Utara (Kabupaten Malinau) dan Provinsi Kalimantan Barat (Kabupaten Kapuas Hulu).



## Mitra Konsorsium

PERMATA dijalankan melalui sebuah Konsorsium yang terdiri dari Samdhana Institute, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), Urban and Regional Development Institute (URDI), Yayasan Kitong Bisa, Perkumpulan Kaoem Telapak, PEREMPUAN AMAN, dan Rainforest Foundation Norway (RFN).

Samdhana Institute dipercaya sebagai pemimpin konsorsium untuk melaksanakan inisiatif ini selama lima tahun (2021 – 2025).

## Dukungan Pendanaan

PERMATA merupakan inisiatif yang didukung oleh Norway's International Climate and Forest Initiative (NICFI) Pemerintah Norwegia melalui Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad).

## Fokus Program Mitra Konsorsium

Hasil yang Diharapkan	Mitra Konsorsium	Wilayah Kerja
Outcome 1: Masyarakat di kabupaten yang memiliki luasan hutan yang luas memiliki hak yang lebih terjamin atas tanah dan sumber daya alam.	BRWA Samdhana Institute	Kab. Merauke, Kab. Jayapura, Kab. Tambrauw, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Malinau, Kab. Kapuas Hulu
Outcome 2: Mata pencaharian masyarakat meningkat	Kitong Bisa	Kab. Merauke, Kab. Teluk Bintuni
	Kaoem Telapak	Kab. Tambrauw
	Samdhana Institute	Kab. Jayapura
Outcome 3: Dimungkinkannya kebijakan dan lembaga secara aktif mempromosikan dan mendukung pengembangan masyarakat berbasis hak.	URDI	Kab. Merauke, Kab. Jayapura, Kab. Tambrauw, Kab. Teluk Bintuni
	BRWA Samdhana Institute	Kab. Merauke, Kab. Jayapura, Kab. Tambrauw, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Malinau
Outcome 4: Masyarakat adat dan komunitas lokal memiliki kapasitas untuk mempertahankan, melindungi dan mengelola sumber daya hutan mereka sebagai bagian dari mata pencaharian yang tangguh dan mandiri.	PEREMPUAN AMAN RFN Samdhana Institute	Kab. Merauke, Kab. Jayapura, Kab. Tambrauw, Kab. Teluk Bintuni

### Samdhana Institute

Telepon: (0251) 7546173

Email: [info@samdhana.org](mailto:info@samdhana.org)

Website: [www.samdhana.org](http://www.samdhana.org)

### Penyampaian Pengaduan:

Url: <https://www.samdhana.org/contact-us/grievance>

Email: [pengaduan@samdhana.org](mailto:pengaduan@samdhana.org)

SMS: 0811 1141849

Surat:

Samdhana Institute

Jl. Tampomas No. 33, Bogor Tengah,  
Kota Bogor, 16128, Prov. Jawa Barat.